KEDUDUKAN HUKUM PENGATURAN NOMINEE DALAM SISTEM HUKUM PERSEROAN DI INDONESIA

Shailawa Ramb Madani, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: shailawa.ramb.madani-2024@fh.unair.ac.id

Alifah Hukma Shabiyya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: alifah.hukma.shabiyya-2024@fh.unair.ac.id

Deninda Arroyan Putri Kurnia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
e-mail: deninda.arroyan.putri-2024@fh.unair.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p06>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas praktik *nominee* dalam korporasi di Indonesia serta urgensi langkah preventif dan represif dalam menangkal potensi tindak pidana pencucian uang dan terorisme yang menggunakan korporasi sebagai sarana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konflik norma antara Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pengaturan konkret terhadap praktik *nominee* dalam korporasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma, sehingga diperlukan rekomendasi pengaturan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin transparansi kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*) sekaligus mendukung upaya pencegahan kejahatan ekonomi.

Kata Kunci: Pemilik Manfaat, *Nominee*, Perseroan Terbatas, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

This study aims to examine the legality of nominee practices in corporations in Indonesia and the urgency of preventive and repressive measures in counteracting potential criminal acts of money laundering and terrorism that use corporations as a means. The research method used is normative juridical with a legislative approach and norm conflict analysis between Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing Beneficial Ownership of Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Money Laundering and Terrorism Financing Crimes, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), and Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM). The results of the study show that the lack of concrete regulation on nominee practices in corporations causes legal uncertainty and conflict of norms, so recommendations for more comprehensive legal arrangements are needed to ensure the transparency of beneficial ownership while supporting efforts to prevent economic crimes.

Key Words: Beneficial Owner, *Nominee*, Limited Liability Company, Money Laundering Crime.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan ekonomi yang mengalami kemajuan signifikan di Indonesia salah satunya adalah kejahatan pencucian uang atau TPPU yang memanfaatkan penyalahgunaan hasil tindak pidana sebelumnya (*predicate crime*) dan mengacu pada asas kriminal ganda (*double criminality*).¹ Karakteristik TPPU yang merupakan mekanisme primer dalam pergerakan *illicit financial flow* (IFF) dari beberapa macam tindak pidana sebagaimana korupsi, terorisme, eksploitasi ilegal sumber daya alam, penghindaran pajak dan berbagai kejahatan yang berorientasi pada keuntungan dengan jumlah besar.² Peningkatan jumlah kejahatan ekonomi ini dipengaruhi oleh kompleksnya modus penyembunyian hasil kejahatan yang salah satu kendaraannya adalah menggunakan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang dikenal sebagai *corporate vehicle*.³ Perusahaan sebagai kendaraan dari modus kejahatan ini sendiri dilakukan dengan menyembunyikan identitas dari pemilik perusahaan sebenarnya.

Pemilik sebenarnya dalam sebuah korporasi dapat disebut sebagai pemilik manfaat (*Beneficial Owner*). Konsep ini merupakan konsep dimana terdapat perbedaan antara seseorang yang secara legal memiliki hak atas suatu aset dengan seseorang yang mendapatkan manfaat tanpa memiliki aset tersebut. Menurut Black's Law Dictionary, pemilik manfaat (*beneficial owner*) merupakan "*the actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; it often differs from the title holder.*"⁴ Sedangkan Pemilik manfaat (*beneficial owner*) menurut Financial Action Task Force (FATF) merupakan seseorang yang dapat mengendalikan orang lain yang secara hukum dan tertulis menjadi penanggung jawab atas suatu transaksi atau aset yang juga dapat menjalankan pengendalian atas *legal person* atau entitas hukum.⁵ *Legal person* yang dimaksud dalam konsep ini disebut sebagai nominee, sehingga nominee tersebut merupakan seseorang yang namanya terdaftar secara legal atas suatu aset tanpa sebenarnya memiliki aset tersebut dan melakukan segala tindakan hukum berdasarkan arahan dari pemilik sebenarnya.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal konsep nominee dalam korporasi, mengingat sistem hukum *Civil Law* menganut *two-tier-board system* dalam teori korporasinya, berlawanan dengan sistem hukum *Common Law* yang menganut teori korporasi *one-tier-board*.⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai dasar hukum kegiatan korporasi di Indonesia tidak mengenal adanya konsep nominee. Namun penggunaan pemegang saham nominee dalam

¹ Ahmad Khozin Baharuddin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Beneficial Owner (BO) Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia", Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur, (2023): 2,

² Nivia, "Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia", *Mimbar Hukum* 35, no. 1, (2023): 30.

³ Ibid.

⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (1990), dikutip dari Anita Sagitaria, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia", *Maleo Law Journal* 6, no.2, (2022).

⁵ Financial Action Task Force, *The FATF Recommendation*, (2012), dikutip dari Anita Sagitaria, "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia", *Maleo Law Journal* 6, no.2, (2022).

⁶ Denny Salim, "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya", *Premise Law Jurnal* 8, (2016): 1-20.

undang-undang ini dilarang pada ketentuan Pasal 48 Ayat (1) UUPT. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) juga menegaskan bahwa penanaman modal di Indonesia dilarang menggunakan perjanjian dan/atau pernyataan atas kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain. Dari ketentuan dua perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan korporasi di Indonesia tersebut, memberikan pandangan bahwa penggunaan konsep nominee dalam korporasi di Indonesia tidak dibenarkan.

Guna mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme, diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai Perpres No. 13 Tahun 2018.⁷ Peraturan tersebut menjadi satu-satunya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum atas praktek nominee dalam korporasi di Indonesia dimana menginstrumenkan transparansi adanya pemilik manfaat dalam korporasi untuk didaftarkan pada sistem administrasi hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adanya peraturan ini belum mengatur secara konkret atas praktek nominee dalam korporasi, mengingat tujuannya adalah untuk melacak tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Tidak memberikan suatu kepastian hukum apakah praktek nominee dalam korporasi dapat diterapkan di Indonesia atau tidak.

Konsep nominee dalam korporasi pada dasarnya adalah pemilik modal serta keuntungan yang sebenarnya dari sebuah korporasi, yang mana modal dalam korporasi yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas berbentuk saham. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang ada pada UUPT dan UUPM. Hal ini menunjukkan adanya konflik norma terkait dengan praktek nominee dalam korporasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang kedudukan UUPT dan UUPM lebih tinggi dari pada Perpres No.13 Tahun 2018. Konflik norma ini dapat terselesaikan berdasarkan asas preferensi hukum *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang berarti peraturan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan yang lebih rendah.⁸ Namun, apakah hal ini juga dapat menanggulangi potensi dari tindak pidana pencucian uang dan terorisme sebagaimana tujuan dari adanya Perpres No. 13 Tahun 2018 merupakan hal yang perlu di pecahkan.

Penulis memandang perlu adanya suatu peraturan yang mengatur praktek nominee secara konkret untuk menjadi jawaban atas hal ini. Bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang kerap dilakukan melalui praktek nominee tetap dapat diakomodir dalam sebuah payung hukum. Hal ini tentu memerlukan atensi dan kajian lebih lanjut dalam hal legalitas praktek nominee di Indonesia. Dimana penelitian ini akan mengkaji legalitas praktek nominee dalam korporasi, serta perlu tidaknya langkah preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme yang kerap menjadikan korporasi yang menjalankan praktek nominee sebagai kendaraannya.

⁷ Nabila Meiwindita, et. al., "Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2, (2022): 274.

⁸ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2, (2017): 193

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas dan regulasi yang berlaku terhadap eksistensi praktek *nominee* dalam korporasi di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari eksistensi praktek *nominee* dalam korporasi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan regulasi yang berlaku terhadap eksistensi praktik *nominee* dalam korporasi di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi yang ditimbulkan dari keberadaan praktik *nominee* terhadap struktur kepemilikan, pengelolaan, serta stabilitas hukum dalam korporasi di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsekuensi yuridis maupun praktis dari praktik tersebut dalam dunia korporasi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif yang akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau konsep hukum sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas.⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini akan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UUPM, dan Perpres No. 13 Tahun 2018. Untuk mendukung pemahaman terkait dengan konsep *nominee* dalam korporasi, penelitian ini akan menggunakan interpretasi dari teori dan konsep *nominee* dan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam sistem hukum common law dan civil law. Hal ini tentu didukung melalui studi kepustakaan melalui buku dan publikasi ilmiah untuk kemudian dapat ditemukan landasan dapat tidaknya konsep *nominee* diterapkan dalam korporasi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Legalitas dan Regulasi yang Berlaku Terhadap Eksistensi Praktek Nominee dalam Korporasi di Indonesia

Pada konteks Penanaman Modal Asing, negara wajib hadir dalam melakukan pengontrolan terhadap kegiatan investasi yang dilakukan investor asing guna mengatur peluang dan batasan bagi investor asing dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang berada di wilayah Indonesia, menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing, dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, beserta peraturan turunannya. Pada Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat amanah untuk pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal, baik penanam modal dalam negeri

⁹ Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Depok : Raja Grafindo Persada, 2020):118.

maupun penanam modal asing yang melakukan penanaman modal di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut merupakan aktualisasi terhadap prinsip *the most favoured nations principles* yang dianut oleh *The World Trade Organization* (WTO). Atas dasar prinsip tersebut, maka di Indonesia terdapat peluang melakukan investasi antara investor asing maupun lokal, walaupun tetap diberlakukan batasan-batasan tertentu bagi investor asing yang akan melakukan investasi di Indonesia. Batasan tersebut searah dengan batasan ketentuan bidang usaha yang tidak boleh dilaksanakan investasi baik secara investasi lokal maupun investasi secara asing, atau dengan terdapatnya kegiatan usaha yang memberi batasan maksimum kepemilikan saham, dan juga terdapat syarat-syarat tertentu bagi investor asing. Hal-hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Tidak jarang pelaku usaha menggunakan skema *Nominee agreement* dengan adanya tujuan investor asing yang menyelundupi hukum yang berlaku dan ada. Investasi *Nominee Agreement* bukan merupakan praktik baru yang terjadi di Indonesia. Pada konteks investasi asing, diantaranya memiliki tujuan mengelabui ketentuan perihal pembatasan kepemilikan saham investor asing dalam suatu bidang usaha, walaupun pada faktanya penggunaan *Nominee* dalam kegiatan penanaman modal baik lokal maupun asing di larang dalam Undang-Undang Penanaman Modal, sebagaimana pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberi pernyataan "Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain". Namun terhadap praktiknya masih terdapat banyaknya *Nominee shareholders* yang mana terdapat seseorang yang ditunjuk untuk memegang saham atau aset atas nama pemilik sebenarnya (*beneficial owner*) melalui *Nominee agreement* walaupun hal tersebut telah diatur dan dilarang. Pemerintah memiliki pandangan bahwa investasi yang ditanamkan walaupun dengan menggunakan *Nominee* tetap memberikan keuntungan yang terlihat dengan adanya penambahan tenaga kerja dan lain sebagainya. Sementara Undang-undang dengan jelas memberikan larangan praktik tersebut. Pengawasan yang sangat minim mengakibatkan suatu praktik kepemilikan saham yang berbentuk *Nominee* semakin banyak terjadi di Indonesia, apabila tidak disegerakan adanya upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut maka akan menyebabkan dampak kerugian bagi rakyat Indonesia. Secara tidak langsung hal tersebut dapat menjadi bentuk penjajahan masa kini¹⁰.

Berdasar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, memberikan ketentuan bahwa Investor asing yang melakukan investasi di Indonesia wajib melakukan pendirian badan usaha terlebih dahulu di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas. Pada proses mendirikan Perseroan Terbatas, terdapat prinsip bahwa wajib didirikan melalui sebuah akta notaris. Adanya Prinsip dasar tersebut, yang memberikan syarat pendirian Perseroan Terbatas melalui sebuah perjanjian (akta notaris), juga sebagaimana pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang membuat pendirian Perseroan Terbatas harus

¹⁰ Iin Indriyani, "Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing", Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang, (2017): 263.

dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham, hal tersebut disebabkan dengan ketidak mungkinan satu orang melakukan perjanjian dengan dirinya sendiri tanpa dengan siapapun. Adanya syarat pendirian perseroan terbatas dengan 2 (dua) orang atau lebih ini dapat menimbulkan *Nominee shareholder*, yang mengarah pada penguasaan perseroan terbatas secara mutlak oleh pemodal asing¹¹. Selain digunakan untuk penguasaan modal oleh pihak asing, Warga Negara Indonesia juga dapat melakukan praktik *nominee shareholder* yang ingin menghindari pencatatan kepemilikan perusahaan atas nama pribadi dengan tujuan menghindari pengawasan atau regulasi tertentu, dapat dicontohkan dengan Warga Negara Indonesia yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia yang dibatasi oleh Undang-Undang dalam hal kepemilikan perusahaan. Di samping itu, *nominee shareholder* juga memiliki potensi digunakan sebagai instrumen dalam tindakan pencucian uang dengan melakukan penyamaran identitas pemilik sebenarnya dari perusahaan. Walaupun *Nominee shareholder* terdaftar sebagai pemilik sah saham perusahaan, namun *Nominee shareholder* dalam melakukan tindakannya berdasar pada petunjuk seseorang yang sebenarnya memiliki saham tersebut (*beneficiary*).¹² Timbulnya hubungan antara *beneficial owner* dengan *Nominee* dapat melalui sebuah perjanjian (*agreement*). Kehadiran dua pihak dalam *Nominee agreement* dapat menimbulkan dua jenis kepemilikan, yaitu yang pertama pemilik yang tercatat dan diakui secara hukum (*legal owner/juridische eigendom*) dan yang kedua pemilik yang sebenarnya (*beneficiary /economische eigendom*) yang menikmati keuntungan.¹³ Artinya, *Nominee agreement* merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh *beneficiary* dengan *Nominee* yang bertujuan memberi ruang kepada *Nominee* guna bertindak untuk dan atas nama *beneficiary* yang tetap sesuai dengan petunjuk dan arahan dari *beneficiary*.

Berdasarkan hukum, *legal owner* merupakan pemegang hak yang memiliki kekuatan sah atas benda tersebut, tentu memiliki hak untuk mengalihkan, menjual, menjaminkan, membebani serta melakukan tindakan apapun atas benda yang bersangkutan, sedangkan pihak *beneficiary* tidak mendapatkan pengakuan sebagai pemilik atas benda secara hukum.¹⁴ Bentuk struktur *Nominee* pemegang saham (*Nominee shareholders*) di Indonesia pada praktiknya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Struktur *Nominee* langsung (*direct Nominee structure*), dan Struktur *Nominee* tidak langsung (*indirect Nominee structure*).

1. Struktur *Nominee* Langsung

Struktur *Nominee* langsung (*direct Nominee structure*) merupakan struktur *Nominee* dengan langsung pada pembuatan perjanjian dan/atau pernyataan yang memberikan penegasan bahwa kepemilikan saham dalam suatu perseroan terbatas merupakan untuk dan atas nama orang lain. Pada umumnya struktur *Nominee* langsung dibentuk dengan membuat perjanjian *Nominee* (*Nominee agreement*) atau pernyataan *Nominee* (*Nominee statement*).¹⁵ Perjanjian *Nominee* merupakan salah satu bentuk dari Perjanjian *Innominaat* hal ini disebabkan belum adanya pengaturan secara khusus dan tidak secara tegas

¹¹ Lucky Suryo Wicaksono, "Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan terbatas", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 23, no. 1, (2016): 44.

¹² Christiari Gratiani Gamaitarak, "Kedudukan *Nominee Shareholder* Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 12, no. 1. (2024): 69.

¹³ Lucky Suryo Wicaksono, op. cit. 48.

¹⁴ Syahril Syukur, "Urgensi Pengaturan *Nominee Agreement* Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang", (Jakarta: PPAK, 2020): 26.

¹⁵ *ibid*

disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdara, akan tetapi pada praktiknya sering dijumpai di Indonesia.

Dalam praktiknya juga sering menggunakan struktur *Nominee* pemegang saham yang dibentuk dengan Pernyataan *Nominee* (*Nominee statement*). Pada dasarnya materi dari suatu pernyataan *Nominee* merupakan pernyataan dari pemegang saham *Nominee* yang memberikan keterangan bahwa uang yang disetor pada suatu perseroan merupakan uang yang bersumber dari *beneficiary*, dengan begitu segala keuntungan, kerugian serta beban pajak yang timbul sehubungan dengan kepemilikan saham oleh pemegang saham *Nominee* pada perseroan merupakan hak dan tanggung jawab dari *beneficiary*.¹⁶ Bersamaan dengan pembuatan *Nominee agreement* atau dengan *Nominee statement*, umumnya pembentukan struktur *Nominee* pemegang saham ini disertakan dengan kuasa mutlak yang akan diberi oleh *Nominee* kepada *beneficiary* yang memiliki tujuan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan saham yang akan dipegang oleh *Nominee* dalam perseroan.¹⁷

2. Struktur *Nominee* tidak langsung

Struktur *Nominee* tidak langsung (*indirect Nominee structure*) merupakan struktur *Nominee* yang dilakukan pembentukan dengan membuat beberapa perjanjian berlapis. Dilakukannya hal tersebut memiliki tujuan agar *beneficiary* tidak secara langsung dapat mengendalikan dan juga mendapat manfaat atas kepemilikan saham tersebut.¹⁸ Terhadap pembuatan struktur *Nominee* tidak langsung, salah satu skema yang diterapkan di Indonesia adalah dengan kegiatan pinjam-meminjam dengan tahapan sebagai berikut:¹⁹

- a. Perusahaan asing dan/atau warga negara asing akan meminjamkan dana terhadap pihak *Nominee* yang merupakan Warga Negara dan/atau badan hukum di Indonesia;
- b. Bentuk pinjam-meminjam *beneficiary* dengan *Nominee* berlandaskan atas Akta Pengakuan Hutang atau dapat juga dengan Perjanjian Pinjaman sebagai perjanjian pokok;
- c. Terdapat pula beberapa dokumen lain yang menjadi perjanjian yang memiliki sifat *accessoir* atau perjanjian turunan dari perjanjian pokok tersebut selain daripada Akta Pengakuan Hutang yang menjadi perjanjian pokok. Perjanjian memiliki sifat *accessoir* tersebut terdiri dari kepentingan oleh *beneficiary* serta mengarah juga pada kepentingan *Nominee*;
- d. Seluruh dokumen nantinya akan membentuk penyamaran kepemilikan saham *beneficiary*, serta memberi manfaat secara utuh kepemilikan saham *Nominee* pada perseroan terhadap *beneficiary* meskipun *beneficiary* tidak tercatat selaku pemegang saham perseroan.

Terkait konsep *Nominee agreement* kepemilikan saham dalam kegiatan Penanaman Modal di Indonesia pada dasarnya dilarang. Bahwa larangan tersebut telah dilakukan pengaturan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

¹⁶ Victoria Tabita, Urgensi Praktik *Nominee Arrangement* Dalam Perjanjian Joint Venture Di Indonesia. *JRP: Jurnal Relasi Publik*1, no. 2, (2023): 123.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Syahrilal Syakur, Op.Cit. 28.

¹⁹ Ibid, 28-29.

Penanaman Modal sendiri telah disebutkan adanya ketentuan yang melarang terhadap terjadinya Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee agreement*) pada keadaan tertentu. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan :

1. Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain
2. Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/ atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum

Pada penjelasan Pasal 33 ayat (1) memberi pernyataan yang cukup jelas bahwa adanya tujuan dari ketentuan tersebut ialah menghindari suatu perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, namun secara materi ataupun secara substansinya pemilik perseroan tersebut merupakan milik dari orang lain. Dapat diketahui dalam ketentuan tersebut kegiatan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas, penanam modal yang menyatakan bahwa kepemilikan saham yang dia miliki merupakan untuk dan atas nama orang lain yang namanya tidak tercantum sebagai pemegang saham di perseroan. Dapat diartikan bahwa pemegang saham tersebut hanya sebagai *Nominee* dari seseorang yang menjadi pemilik modal sebenarnya dalam pendirian perseroan tersebut atau yang menjadi dari *beneficial owner* , dengan begitu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU Penanaman Modal maka Perjanjian tersebut ialah batal demi hukum.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang memberi pernyataan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Pada penjelasan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut memberi pernyataan bahwa yang dimaksud pada ketentuan ini ialah Perseroan hanya diperbolehkan mengeluarkan suatu saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*bearer stock*). berdasar kepemilikan saham tersebut, pemegang saham akan dilakukan pemberian bukti pemilikan saham terhadap saham yang dimilikinya nanti. Sehingga seorang pemegang saham dari suatu perseroan terbatas tidak mungkin memberi pernyataan atau melakukan perjanjian bahwa saham yang dia miliki ialah untuk dan atas nama orang lain atau dapat dikatakan saham tersebut hanya sebagai *Nominee*. Dengan begitu orang yang tidak tercatat sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas tidak dimungkinkan untuk mendapat pengakuan bahwa dengan adanya bukti perjanjian pinjam nama (*Nominee agreement*) antara dia dengan pemegang saham, dengan begitu dia merupakan pemilik sebenarnya dari saham pada perseroan terbatas.

Perusahaan *Joint Venture* ialah perusahaan yang dibentuk atas dasar perjanjian kerjasama antara entitas para pihak dengan tujuan membentuk suatu perusahaan baru.²⁰ Terkait hal ini, pihak pengusaha asing dengan asing, atau pengusaha lokal dengan lokal, pengusaha asing dengan lokal, sesuai dengan peraturan perundang-

²⁰ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, "Hukum Investasi dan pasar Modal", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 118.

undangan di Indonesia melakukan pembentukan suatu perusahaan baru yang dikenal dengan perusahaan *joint venture*. Pembentuk perusahaan akan menjadi pemegang saham yang memiliki besaran sesuai dengan kesepakatan, serta tidak melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi kepemilikan saham maksimum yang berlaku terhadap pengusaha asing ataupun pengusaha dalam negeri.

Perjanjian *Joint venture* bagi investor asing sendiri bersumber dari ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan ketentuan adanya bidang usaha yang terbuka untuk modal asing, dan juga bidang usaha yang terbuka dengan adanya persyaratan pembatasan kepemilikan saham.²¹ Ketentuan yang memberikan pengaturan hal tersebut, saat ini telah dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Bagi investor asing, salah satu hal esensial dalam melakukan kegiatan investasi asing melalui pendirian perusahaan *joint venture* ialah berkaitan dengan kepemilikan saham. Adapun untuk pendirian perusahaan *joint venture* oleh pihak asing sendiri, berdasar pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka perusahaan *joint venture* tersebut wajib berbentuk Perseroan Terbatas. Kembali terhadap syarat pendirian Perseroan Terbatas, mensyaratkan bahwa harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Persyaratan pendirian perseroan terbatas dengan harus adanya 2 (dua) orang atau lebih ini juga dapat menjadi penyebab kemungkinan timbulnya *Nominee shareholder*, yang pada umumnya bahwa pemodal asing ingin dapat secara luas dan menyeluruh menguasai perseroan terbatas.²² Bahwa apabila entitas baik dalam bentuk orang perorangan atau badan usaha asing yang mendirikan sebuah perusahaan dengan menggunakan *Nominee* di Indonesia, maka status dari perjanjian pendirian sebuah perusahaan tersebut akan menjadi batal demi hukum. Pada konteks ini, jika suatu perusahaan *joint venture* terdapat pihak asing yang berinvestasi dalam pendiriannya terdapat *Nominee*, maka *joint venture agreement* tersebut menjadi batal demi hukum, dengan begitu maka perusahaan *joint venture* tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terbentuknya suatu perusahaan.

Setelah mengetahui kedudukan *beneficiary* dalam suatu transaksi, hadirilah ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut, tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang disebut dengan 'Perpres BO'. Berdasarkan Pasal 3 Perpres BO memberikan pernyataan bahwa "Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi". Dapat ditujukan variabel Pemilik Manfaat ialah 'pemilik sebenarnya dari dana atau modal korporasi'.²³ Dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden terkait *Beneficial owner* tersebut, timbul sebuah benturan norma terkait Peraturan yang konkrit yang dapat di jadikan sebagai landasan yang kuat dalam di implementasikannya terhadap suatu masalah yang berkaitan

²¹ ibid

²² Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit. 44.

²³ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 8 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (1) huruf e, dan Pasal 10 Ayat (10) huruf e Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

dengan *Beneficial owner*. Dilain sisi, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung larangan atas keberadaan *Nominee shareholders* dengan segala bentuk apapun, yang secara jelas terdapat *beneficiary /ultimate beneficial owner*-nya. Namun, di sisi lain, terdapat Peraturan Presiden terkait *Beneficial owner* yang mengandung peraturan berkebalikan dengan Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas, pada Peraturan Presiden terkait *Beneficial owner* justru terdapat kewajiban untuk seluruh korporasi guna menetapkan Pemilik Manfaat atau *beneficial owner* dari suatu korporasi melewati identifikasi serta verifikasi *beneficial owner* dari perusahaan tersebut. Apabila ditarik kembali kepada konteks perusahaan *joint venture* dalam investasi asing dapat mengalami kendala efektivitasnya atau terdapat ketidakjelasan norma yang berlaku dalam menyelesaikan suatu masalah terkait. Hal ini dapat terjadi karena regulasi dalam Perpres BO bisa bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga berdasarkan asas preferensi, peraturan yang lebih tinggi kedudukannya harus diutamakan. Dalam hal ini terlihat akan mengakibatkan potensi ketidakefektifan dalam implementasi Perpres BO dan hingga saat ini belum terdapat peraturan yang memberikan kejelasan terkait penggunaan peraturan yang konkrit dalam menghadapi permasalahan tersebut.

3.2. Implikasi dari Eksistensi Praktek *Nominee* dalam Korporasi di Indonesia

Praktik *Nominee* bisa ditemui dalam mendirikan perusahaan yang bersifat *joint venture*. Penggunaan *nominee shareholder* ini digunakan untuk memenuhi syarat pendirian suatu perseroan terbatas termasuk organnya (direksi, RUPS dan komisaris *nominee*). Faktor yang menjadi penyebab dari *beneficiary* melakukan praktik *Nominee* adalah untuk melindungi identitas sebenarnya dengan tujuan agar data dirinya tidak diketahui oleh publik. Kemudian terdapat keinginan mereka untuk menguasai sepenuhnya kepemilikan saham perseroan terbatas yang mana dilarang oleh UUPT. Dalam UUPT menyebutkan bahwa syaratnya agar pemegang saham minimal dua orang, apabila hanya satu orang, maka pemegang saham tunggal akan mengakibatkan tanggung jawab tidak terbatas atau tanggung jawab pribadi.²⁴ Dalam UUPT tidak dijelaskan untuk memenuhi minimal 2 (dua) orang pemegang saham ini bagaimana mekanismenya apabila hanya 1 (satu) orang yang mempunyai saham. Faktor lainnya yang umum terjadi adalah sebagai penggunaan praktik *nominee* untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan perbuatan yang memiliki upaya guna menyembunyikan terhadap aset yang diperoleh dari hasil tindakan pidana seperti melaksanakan beragam transaksi keuangan yang bertujuan agar harta kekayaan yang tersebar diberbagai transaksi dengan orang berbeda sebagai pemilik harta tersebut, sehingga harta tersebut seolah-olah merupakan uang yang berasal dari kegiatan sah. *Beneficial owner* saham melakukan penunjukan komparisi *nominee* untuk menjadi pemilik sah secara hukum dalam kepemilikan saham pada PT dengan menutup atau menyembunyikan seluruh identitas *beneficial owner*, dengan begitu dapat dicurigai bahwa dana *beneficial owner* sebagai bentuk

²⁴ Chris Agave Valentin Berutu, et. Al, "Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". *Locus Journal of Academic Literature Review*, (2022): 364.

langkah guna melakukan pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan asal usul dana dalam memiliki saham. Perbuatan untuk memiliki saham dengan cara *nominee* tentu akan menjadi perbuatan yang dilarang, karena akan memiliki peluang untuk menimbulkan akibat hukum yang tidak berakibat terhadap satu akibat saja, namun juga berbagai akibat hukum yang merugikan pihak-pihak lainnya termasuk merugikan negara. Perkara tindak pidana korupsi salah satunya yang dapat merugikan negara dengan dilanjutkan terhadap kegiatan pencucian uang dengan penggunaan *nominee*, nama orang lain pihak ketiga, keluarga, dan penggunaan kerabat lainnya yang tidak jarang dijadikan pilihan untuk melakukan tindak pidana khususnya TPPU oleh pelaku kejahatan.²⁵ Kepemilikan saham oleh komparasi *nominee* akan melakukan tindakan dihadapan hukum walaupun dananya berasal dari *beneficial owner*. Dana yang digunakan memiliki saham disertai dengan menggunakan perjanjian *nominee* sebagai pemilik saham, perlu dicurigai karena dapat memiliki peluang bahwa dana tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana yang selanjutnya uang tersebut diputar dengan kegiatan-kegiatan yang meminimalisir terungkapnya dari mana asal usul dana.²⁶ Unsur-unsur TPPU sebagaimana yang diatur pada Pasal 3, 4, 5 UU TPPU, apabila tindakan yang dilakukan diduga atas hasil pencucian uang yang memiliki tujuan guna menyembunyikan asal usul sumber dana sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan UU TPPU. *Beneficiary* melakukan praktik *nominee* untuk TPPU dengan tujuan agar sulit dilacak identitasnya, dapat mengklaim kepemilikan aset secara sah, untuk melakukan transaksi palsu yang dapat dikatakan sah, padahal sebenarnya merupakan tindakan pencucian uang.

Aturan mengenai konsep dari kepemilikan saham diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat UUPT yaitu kepemilikan saham mutlak yang memiliki arti bahwa saham itu suatu kesatuan yang utuh sehingga hak yang terdapat padanya tidak dapat dibagi-bagi.²⁷ Karena hal tersebut, dalam penerapannya di Indonesia, hanya mengenal mengenal satu orang sebagai pemegang saham yang melekat pada dirinya sebagai pemegang saham mutlak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1), pasal 52 ayat (4), dan pasal 60 ayat (4) UUPT. Keberadaan dari adanya pemegang saham *Nominee* yang terdapat pada UUPT tidak pernah disinggung pada seluruh pasalnya, akan tetapi apabila kita memahami ketentuan Pasal 48 ayat (1) UUPT yang berbunyi "saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya" akan dapat diketahui bahwa pemegang saham *Nominee* sebenarnya telah dilarang oleh UUPT.²⁸ Dengan adanya bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa secara substansi telah melarang praktik *Nominee* yang memberi penegasan mengenai kepemilikan saham untuk dan atas nama orang lain.

²⁵ Novariza, "Pengaturan Transparansi Beneficial Ownership Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU", *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, no. 3, (2021): 53.

²⁶ Wahyu Hidayat, "Strategi Dan Cara Penyelesaian Pencegahan Dalam Pemberantasan Korupsi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)", *SINTAKSIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 72.

²⁷ Fitri Riani Baharudin, et. al, "Nominee Agreement dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum Perseroan Terbatas" *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 2, (2024): 113.

²⁸ Nigita Okvimada dan Muh Afif Mahfud, "Keabsahan Pemegang Saham *Nominee* Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1, (2023): 214

Realitanya, kepemilikan saham yang dilakukan lebih dari seorang juga diperbolehkan yang telah diatur pada Pasal 52 ayat (5) UUPM yang memberi pernyataan bahwa dalam hal satu saham yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang ditimbulkan dari saham itu digunakan melalui cara menuntut seorang untuk menjadi wakil bersama. Tetapi, makna pasal 52 ayat (5) ini berbeda dari praktik *Nominee*. Pasal ini, orang-orang yang bukan merupakan wakil bersama yang sama-sama memiliki satu saham itu tetap harus dicatatkan namanya sebagai penunjuk seorang wakil untuk menggunakan hak yang timbul dari adanya saham tersebut. Berbeda halnya dengan praktik *Nominee*, yang hanya pihak *Nominee* saja yang namanya tercatat, sedangkan *beneficiary* (pemilik sebenarnya) tidak tercatat.²⁹ Dari pernyataan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan praktik *Nominee* bertentangan dari konsep kepemilikan saham mutlak pada pasal 52 ayat (4) yang berbunyi " Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi" pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap saham memberikan hak pada pemiliknya yang tidak dapat dibagi-bagi.³⁰ Ketentuan mengenai *Nominee* yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat UUPM, dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) UUPM yang berisi:

"(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum."

Pasal tersebut berisikan larangan praktik *Nominee* dalam kepemilikan saham pada suatu perseroan terbatas. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila terbukti melakukan praktik *Nominee* yaitu perjanjian atau pernyataan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, alasannya adalah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena objek perjanjian yang dibuatnya telah bertentangan dengan Pasal 33 UUPM tersebut.³¹ Praktik *Nominee* di Indonesia dilakukan tidak sesuai dengan kausa yang diperbolehkan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Karena, pada dasarnya praktik *Nominee* ada dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.³² Objek perjanjian *Nominee* adalah kepemilikan sesuatu untuk dan atas nama orang lain atau dengan kata lain pinjam nama.³³

Eksistensi praktik *Nominee* diakui dalam hukum Indonesia berdasar atas asas kebebasan berkontrak yang mana bukan suatu bentuk perjanjian yang melanggar

²⁹ Fitri Riani Baharudin, et. al, loc. cit.

³⁰ Lucky Suryo Wicaksono, Op.Cit.. 52.

³¹ Maharani Putrayasa dan Ketut Sukranatha, "Keberadaan *Nominee* Agreement Kepemilikan Saham Oleh Orang Asing Dalam Perseroan Terbatas", 7, no. 2, (2019): 11.

³² Nabila Meiwindita, Lastuti Abubakar, dan Ema Rahmawati, "Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Sains Sion Humaniora* 6, no. 2, 279.

³³ Anak Agung Intan Permata Sari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, "Keabsahan Perjanjian *Nominee* Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas", *Jurnal Kertha Semaya* 4, no. 2, (2021): 4.

aturan perjanjian di Indonesia. Hal ini tergantung akan obyek dari perjanjian yang dilaksanakan para pihak tersebut. Apabila obyeknya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka akan menimbulkan adanya akibat hukum. Akibat yang ditimbulkan dari adanya praktik *Nominee* adalah dari pemegang saham *Nominee*, berdasar pada hukum di Indonesia, hak serta kewajiban *Nominee* ada seperti halnya pemegang saham biasa, karena pemegang saham *Nominee* merupakan pemilik saham yang tercatat secara hukum. Selanjutnya, akibat hukum terhadap pihak *Beneficiary* adalah tidak diakuinya sebagai pemegang saham, karena yang terdaftar adalah pihak *Nominee*. Akibat hukum terhadap perseroan terbatas adalah tetap sah serta memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat normatif pendirian perseroan terbatas dan melakukan penanaman modal, tapi dapat dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan karena perbuatannya yang melanggar hukum. Korporasi yang terdapat praktik *Nominee* mempunyai cacat hukum dalam pendiriannya karena terjadi pelanggaran dalam keterangan nama pemegang saham, rincian jumlah saham serta nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor sesuai dengan pasal 8 ayat (2) huruf c UUPT.³⁴ Kecacatan hukum praktik *nominee* dalam kepemilikan saham di Indonesia karena tidak terpenuhinya unsur keabsahan menurut Pasal 1320 KUHPerdara yang merujuk pada larangan yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT dan Pasal 33 ayat (1) UUPM.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik *nominee* di Indonesia yang cukup marak terjadi adalah praktek TPPU pada pasar modal. Pelaku TPPU sering menggunakan praktik *Nominee* berupa pemegang saham *Nominee* dan direktur *Nominee* dalam melakukan perbuatan untuk menyembunyikan harta kekayaannya hasil dari melakukan tindak pidana. Pada TPPU, pastinya pelaku berusaha untuk menyembunyikan serta menempatkan harta kekayaannya yang berasal dari tindak pidana seolah-olah merupakan harta yang sah. Melihat maraknya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di Indonesia menggunakan praktik *nominee*, hal ini menjadi penting untuk segera membentuk norma yang konkret untuk mengatur adanya praktik *nominee* di Indonesia untuk mencegah adanya dampak yang terjadi pada TPPU, karena dengan tidak adanya aturan yang jelas, memudahkan untuk melakukan praktik *nominee*. Pada prinsipnya, praktik *nominee* dilarang secara tegas di Indonesia, yang mana pengaturannya terdapat pada Pasal 48 UUPM dan perjanjian ini dapat dikatakan batal hukum karena tidak memenuhi syarat kausa yang halal sesuai pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer. Namun, pasal tersebut tidak secara tegas melarang penggunaan saham *nominee*, alasannya adalah belum ada pengawasan secara langsung oleh pemerintah.³⁵ Tidak adanya aturan yang tegas mengenai larangan *nominee shareholder*, membuat praktik *nominee* berkembang dengan pembentukan *nominee* tidak langsung yang menyebabkan *nominee* tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan.

Adanya peraturan konkret untuk mengatur adanya praktik *nominee* sangat penting sebagai bentuk upaya preventif dan represif dengan tujuan sebagai pencegahan penyalahgunaan, seperti tindak pidana pencucian uang. Dengan upaya preventif diperlukan agar dengan adanya peraturan yang jelas dapat mengetahui identitas dari pemilik sebenarnya dari aset, mencegah adanya tindakan penyalahgunaan serta mencegah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan.

³⁴ Kevin Pahlevi, et. al, "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1, (2017): 14-15.

³⁵ Victoria Tabita. Op.Cit, 127.

Selanjutnya, untuk upaya represifnya, adanya peraturan konkret diharapkan memberi pedoman hukum yang kuat bagi penegak hukum terhadap praktik *nominee* dan dapat memberikan pedoman dalam menyelesaikan tindak pidana pencucian uang yang menggunakan praktik *nominee*.

4. KESIMPULAN

Praktek *nominee* dalam korporasi di Indonesia marak dijumpai dengan tujuan penyelundupan dan/atau penghindaran hukum. Hal ini dilakukan baik untuk pemegang saham *nominee* yang merupakan warga negara asing, warga negara Indonesia dengan pembatasan perundang-undangan dan juga warga negara Indonesia yang dengan sengaja ingin melakukan penghindaran hukum berupa pencucian uang. Praktek ini umumnya dilaksanakan dengan adanya perjanjian *nominee* yang ada dalam struktur *nominee* langsung atau dengan perjanjian berlapis pada struktur *nominee* tidak langsung. Terhadap perjanjian *nominee* diatur dalam Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang melarang eksistensi dan menyatakan batal demi hukum terhadap perjanjian *nominee* untuk kepemilikan saham pada perseroan terbatas. Hal ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan saham perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya. Meski kedua ketentuan perundang-undangan tersebut telah melarang konsep kepemilikan saham perseroan secara *nominee*, Peraturan Preasiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyuarakan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas hal tersebut dapat ditemui konflik norma yang berdasarkan asas preferensi dapat diterapkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior sehingga kepemilikan saham perseroan melalui skema *nominee* merupakan hal yang dilarang. Meski demikian, belum ada aturan konkret terkait *nominee* dalam perseroan yang menyebabkan kekosongan hukum dimana jika *nominee* dilakukanantisipasi melalui prinsip mengenali pemilik manfaat dengan tujuan menghindari tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Tidak terdapatnya peraturan-perundang undangan yang menjadi langkah represif atas skema *nominee*, menjadi sebuah kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum terutama terhadap implikasi yang ditimbulkan olehnya. Hal ini terkait pertanggungjawaban para pihak dalam skema *nominee* serta kedudukan perseroan yang memiliki kemungkinan di bubarkan melalui penetapan pengadilan atas perbuatan melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin & Zainal Asikin. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Depok : Raja Grafindo Persada (2020).

Jurnal/Tesis/Skripsi/Prosiding

Baharuddin, A. K. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Beneficial Owner (BO) Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia". *Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur*. (2023).

Baharudin, F.R., et. al. "Nominee Agreement dalam Pengalihan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian dan Hukum

- Perseroan Terbatas". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2 No. 2. (2024). <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i2.1735>.
- Berutu, C. A. V., et. al. Perampasan Aset Pengendali Korporasi Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Locus Journal of Academic Literature Review* 1. No. 6. (2022). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.87>.
- Febianti, A. R. "Akibat Hukum Praktik Nominee Shareholders Dalam Penandatanganan Perjanjian Jualbeli Saham Antara Dunestone Developments, S.A. Dengan Pt Cakra Mineral Tbk". *Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung*. (2022).
- Gamaitarak, C. G. et. al. "Kedudukan Nominee Shareholder Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 12. No. 1. (2024).
- Indriyani, I. "Perkembangan Hukum: Perseroan Terbatas Dan Praktik Penggunaan Nominee Oleh Investor Asing". *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Fakultas Hukum Universitas Pamulang*. (2017).
- Jumalan, R. "Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. 2. No. 2. (2018).
- Kevin Pahlevi, et. al. "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal* 6. No. 1. (2017). <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15544>.
- Makhfudz, M. "Seberapa Penting Investasi Asing Dipertahankan Di Indonesia". *ADIL: Jurnal Hukum* 7. No, 1. (2016). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.330>.
- Meiwindita, N. et. al. "Kedudukan Beneficial Owner Dalam Korporasi Ditinjau Dari Aspek Perjanjian Dan Hukum Perseroan Terbatas". *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, No. 2. (2022). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22917>.
- Nivia. "Dualisme Pengaturan Beneficial Ownership di Indonesia". *Mimbar Hukum* 35, No. 1. (2023). <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.5155>.
- Okvimada, N. dan Muh Afif Mahfud. "Keabsahan Pemegang Saham Nominee Pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 13. No. 1. (2023). <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i1.6892>.
- Putrayasa, M. dan Ketut Sukranatha. "Keberadaan Nominee Agreement Kepemilikan Saham Oleh Orang Asing Dalam Perseroan Terbatas" 7. No. 2. (2019). *JURNAL*.
- Sagitaria, A. "Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) di Perusahaan Indonesia". *Maleo Law Journal* 6. No.2. (2022).10.56338/mlj.v6i2.2421.
- Salim, D. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Komisaris Nominee Dalam Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Perseroan". *Premise Law Jurnal* 8. (2016).
- Sari, A. A. I. P., dan Ni Ketut Supasti Darmawan. "Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham dalam Pendirian Perseroan Terbatas". *Jurnal Kertha Semaya* 4. No. 2. (2021).
- Sukananda, S. "Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum* 5. No. 2. (2019). 10.32503/diversi.v5i2.559.
- Syakur, S. "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagai Pelaku Pencucian Uang dan Kejahatan Lainnya dalam Perseroan Terbatas". *aml/cft journal* 1, No. 1. (2022). <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.28>.

- Syakur, S. "Urgensi Pengaturan Nominee Agreement Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jakarta: PPATK* (2020). JURNAL
- Tabita, V. "Urgensi Praktik Nominee Arrangement Dalam Perjanjian Joint Venture Di Indonesia". *JRP:Jurnal Relasi Publik* 1. No. 2. (2023).
<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i2.341>.
- Taqiuddin, H. U. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, No. 2. (2017).
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343>.
- Wicaksono, L. S. "Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan terbatas". *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 23. No. 1. (2016).
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art3>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Diundangkan di Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 23.